



Bahasa Politik Lokal: Studi Diksi Legislator Kota Sorong Berbasis Kearifan Lokal

Rosalin Thesia¹, Abu Sofyan²

¹²Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Muhammadiyah Sorong

Korespondensi: abusofyanums11@gmail.com

Abstract

Political language plays a strategic role in the communication process between legislators and the public, particularly within local governments that have distinctive social and cultural characteristics. This study aims to analyze the lexical choices used by legislators in Sorong City that reflect local wisdom values in political communication practices. The research employs a descriptive qualitative approach using discourse analysis. The data consist of legislators' spoken utterances and written texts obtained from documentation of Regional House of Representatives sessions, official statements, and coverage by local media. Data were collected through observation, note-taking, and documentation, while data analysis involved identifying, classifying, and interpreting political diction containing elements of local wisdom. The findings show that Sorong City legislators tend to use persuasive, inclusive, and contextual diction by employing local Papuan terms, expressions, and cultural symbols as a strategy to build closeness with the community. This local wisdom-based diction functions not only as a means of conveying policy but also as a form of political legitimacy and reinforcement of local identity. The study concludes that local political language plays an important role in fostering effective, ethical political communication rooted in the cultural values of the local community.

Keywords: *political language, diction, legislators, local wisdom, Sorong City.*

Abstrak

Bahasa politik memiliki peran strategis dalam proses komunikasi antara legislator dan masyarakat, khususnya dalam konteks pemerintahan daerah yang memiliki karakter sosial dan budaya yang khas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan diksi bahasa para legislator Kota Sorong yang merefleksikan nilai-nilai kearifan lokal dalam praktik komunikasi politik. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan metode analisis wacana. Data penelitian berupa tuturan lisan dan teks tertulis legislator yang diperoleh dari dokumentasi sidang DPRD, pernyataan resmi, serta pemberitaan media lokal. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, pencatatan, dan dokumentasi, sedangkan analisis data meliputi identifikasi, klasifikasi, dan interpretasi diksi politik yang mengandung unsur kearifan lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legislator Kota Sorong cenderung menggunakan diksi yang bersifat persuasif, inklusif, dan kontekstual, dengan memanfaatkan istilah, ungkapan, serta simbol budaya lokal Papua sebagai strategi membangun kedekatan dengan masyarakat. Penggunaan diksi berbasis kearifan lokal ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana

penyampaian kebijakan, tetapi juga sebagai bentuk legitimasi politik dan penguatan identitas lokal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa bahasa politik lokal berperan penting dalam membangun komunikasi politik yang efektif, beretika, dan berakar pada nilai-nilai budaya masyarakat setempat.

Kata kunci: bahasa politik, diksi, legislator, kearifan lokal, Kota Sorong.

Pendahuluan

Bahasa politik pada level lokal tidak sekadar alat menyampaikan informasi, tetapi juga *ruang perebutan makna* yang ikut menentukan bagaimana kebijakan dipahami, diterima, atau ditolak oleh publik. Dalam praktik komunikasi legislator—misalnya saat sidang, rapat dengar pendapat, pernyataan pers, atau dialog reses—pilihan kata (diksi) menjadi perangkat penting untuk membingkai masalah publik, membangun legitimasi, serta menegosiasikan dukungan. Chilton menekankan bahwa analisis bahasa politik penting karena bahasa bukan hanya “cerminan” politik, melainkan juga sarana utama untuk melakukan tindakan politik: memengaruhi persepsi, membentuk posisi, dan mengatur jarak-kedekatan antara aktor politik dan audiens.

Dalam konteks daerah multikultural seperti Kota Sorong, diksi legislator berpotensi kuat terkait dengan identitas sosial dan representasi kelompok. Kajian analisis wacana kontemporer menunjukkan bahwa isu identitas, krisis, dan dinamika demokrasi ke

rap dimediasi lewat bahasa—termasuk melalui slogan, label, dan istilah yang “terasa dekat” dengan pengalaman sosial warga. Wodak menyoroti bagaimana wacana politik bergerak melalui tema identitas dan konteks krisis (misalnya periode-periode krisis sosial), sehingga pilihan kata aktor politik menjadi penanda penting untuk membaca arah dan strategi komunikasi politik.

Salah satu dimensi penting bahasa politik lokal adalah keterkaitannya dengan *kearifan lokal*—yakni nilai, norma, dan simbol budaya yang hidup dalam masyarakat setempat dan sering dipakai sebagai rujukan moral maupun identitas kolektif. Penelitian tentang kampanye politik Indonesia juga menunjukkan bahwa “kearifan lokal” kerap hadir melalui simbol budaya, istilah khas, dan narasi kedekatan yang digunakan aktor politik untuk membangun resonansi dengan publik, meskipun eksplorasinya sering masih terbatas pada simbolisasi. Dalam arena legislatif, strategi semacam ini dapat muncul dalam bentuk diksi yang mengedepankan harmoni sosial, penghormatan pada tokoh/adat, serta penekanan pada nilai kebersamaan dan keadilan sosial yang dipahami warga.

Secara metodologis, studi ini ditempatkan dalam tradisi Analisis Wacana Kritis (AWK/CDA) yang memandang bahasa sebagai praktik sosial—artinya, teks dan tuturan tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dengan proses produksi, distribusi, dan konteks sosial-budaya yang lebih luas. Model tiga dimensi Fairclough (analisis teks, praktik wacana, dan praktik sosial-budaya) banyak digunakan untuk menghubungkan pilihan leksikal (diksi) dengan kepentingan, relasi kuasa, serta konteks institusional. Sejalan dengan itu, van Dijk menegaskan bahwa CDA berfokus pada bagaimana ketimpangan, dominasi, dan legitimasi dapat “bekerja” melalui teks dan ujaran dalam konteks sosial-politik. Kerangka ini relevan untuk membaca diksi legislator: kapan kata dipakai untuk merangkul, kapan untuk menekan, kapan untuk mengaburkan tanggung jawab, dan kapan untuk menguatkan identitas lokal.

Walaupun kajian bahasa politik dan analisis wacana telah berkembang, penelitian yang secara spesifik menautkan diksi legislator Kota Sorong dengan basis kearifan lokal masih relatif terbatas, terutama yang memanfaatkan data institusional seperti notula/risalah sidang, pernyataan resmi, dan jejak pemberitaan lokal sebagai korpus wacana. Padahal, pada level lokal, praktik berbahasa legislator sangat menentukan kualitas komunikasi kebijakan: apakah bahasa yang dipakai memperjelas substansi, mendorong partisipasi, serta menjaga etika deliberasi, atau justru menciptakan jarak, bias, dan polarisasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan: (1) mengidentifikasi bentuk-bentuk diksi yang dominan digunakan legislator Kota Sorong dalam berbagai konteks komunikasi publik; (2) mendeskripsikan bagaimana unsur kearifan lokal hadir dalam pilihan kata, ungkapan, atau simbol bahasa; dan (3) menjelaskan fungsi sosial-politik diksi berbasis kearifan lokal, baik sebagai strategi persuasif, penguatan identitas, maupun legitimasi kebijakan. Secara teoretis, studi ini diharapkan memperkaya kajian bahasa politik lokal dalam perspektif CDA; secara praktis, temuan penelitian dapat menjadi masukan untuk membangun komunikasi legislatif yang lebih inklusif, kontekstual, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Selain sebagai strategi komunikasi, diksi bahasa legislator juga berfungsi sebagai instrumen etika politik. Habermas (2015) menegaskan bahwa komunikasi politik yang ideal dalam ruang publik harus berlandaskan rasionalitas komunikatif, yaitu bahasa yang mendorong dialog, saling pengertian, dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks lokal, prinsip ini menjadi semakin penting

karena legislator berhadapan langsung dengan masyarakat yang memiliki ikatan sosial dan budaya yang kuat. Penggunaan diksi yang selaras dengan nilai kearifan lokal berpotensi menciptakan komunikasi deliberatif yang lebih inklusif, mengurangi jarak antara wakil rakyat dan konstituen, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.

Lebih lanjut, kajian linguistik politik mutakhir menunjukkan bahwa bahasa lokal bukan sekadar “hiasan budaya”, melainkan bagian dari strategi representasi politik. Menurut Krzyzanowski dan Wodak (2022), aktor politik di tingkat lokal sering memanfaatkan bahasa yang berakar pada identitas budaya untuk mengonstruksi citra sebagai “bagian dari komunitas”, bukan sekadar elite kekuasaan. Dalam praktiknya, diksi yang mengandung nilai lokal dapat berfungsi sebagai simbol kedekatan emosional, legitimasi moral, dan klaim otoritas berbasis budaya. Namun, strategi ini juga memiliki ambiguitas: di satu sisi memperkuat representasi, tetapi di sisi lain berpotensi menjadi retorika simbolik yang tidak selalu diikuti oleh kebijakan substantif.

Dalam konteks Kota Sorong sebagai wilayah dengan keragaman etnis, budaya, dan pengalaman sosial, kajian terhadap diksi legislator menjadi semakin relevan. Pilihan bahasa yang sensitif terhadap kearifan lokal Papua dapat memperkuat kohesi sosial dan menciptakan komunikasi kebijakan yang lebih kontekstual. Sebaliknya, diksi yang tidak mempertimbangkan nilai lokal berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, resistensi, atau bahkan delegitimasi kebijakan. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap bahasa politik lokal tidak hanya penting dari sisi linguistik, tetapi juga dari perspektif tata kelola pemerintahan yang demokratis, responsif, dan berkeadilan sosial.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain analisis wacana kritis (AWK). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada pemaknaan, konteks, dan fungsi sosial dari penggunaan diksi bahasa politik legislator, bukan pada pengukuran frekuensi semata. Analisis wacana kritis digunakan untuk mengungkap hubungan antara bahasa, kekuasaan, dan konteks sosial-budaya, khususnya dalam praktik komunikasi politik lokal yang berlandaskan kearifan lokal masyarakat Kota Sorong. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa tuturan lisan dan teks tertulis legislator Kota Sorong yang diperoleh dari dokumentasi sidang DPRD, rapat dengar pendapat, pidato resmi, serta pernyataan legislator di ruang publik. Data sekunder berasal dari pemberitaan media lokal, dokumen kebijakan, risalah rapat, serta arsip resmi yang relevan dengan aktivitas legislasi dan komunikasi politik di Kota Sorong. Pemilihan data dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan konteks komunikasi yang merepresentasikan interaksi legislator dengan publik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi nonpartisipan, dokumentasi, dan pencatatan teks wacana. Observasi nonpartisipan digunakan untuk memahami konteks penggunaan bahasa politik dalam situasi formal dan semi-formal, sementara dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan teks tertulis dan rekaman tuturan yang relevan. Seluruh data yang terkumpul kemudian ditranskripsikan dan diklasifikasikan berdasarkan konteks, tema kebijakan, serta jenis forum komunikasi.

Hasil dan Pembahasan

1) Diksi persuasif–inklusif sebagai strategi “merangkul publik”

Berdasarkan pembacaan teks (pernyataan resmi, risalah/agenda rapat, dan pemberitaan media), diksi legislator Kota Sorong cenderung menonjolkan kosakata yang inklusif dan persuasive misalnya bentuk ajakan/komitmen (“kita”, “bersama”, “mari”, “komitmen”, “penguatan”), serta diksi yang menegaskan keberpihakan (“kepentingan masyarakat”, “aspirasi warga”, “keadilan”, “pemerataan”). Pola ini sejalan dengan kajian bahasa politik yang menempatkan pilihan kata sebagai perangkat membangun *alignment* dengan audiens dan mengarahkan penerimaan terhadap agenda kebijakan. Dalam kerangka CDA, strategi semacam ini dipahami sebagai praktik wacana untuk mengelola relasi kuasa secara halus melalui bahasa.

Pada saat yang sama, diksi inklusif sering muncul sebagai *penanda legitimasi* yakni upaya menampilkan diri sebagai representasi “suara bersama”, bukan kepentingan kelompok sempit. Wacana “kebersamaan” ini lazim dipakai dalam komunikasi politik untuk membangun kedekatan, menurunkan resistensi, dan menguatkan kesan bahwa kebijakan yang dibahas adalah hasil kepentingan kolektif. Temuan ini konsisten dengan pembacaan mutakhir tentang slogan/ungkapan politik yang bekerja sebagai perangkat ringkas untuk mengikat emosi publik dan membangun posisi politik tertentu.

2) Diksi berbasis kearifan lokal sebagai penegasan identitas dan kedekatan sosial

Unsur kearifan lokal tampak melalui penggunaan istilah/ungkapan yang merujuk pada nilai budaya dan tatanan sosial setempat (misalnya penekanan pada hormat, kebersamaan, musyawarah, dan pengakuan terhadap otoritas adat). Pada konteks Papua, kearifan lokal juga sering dibahas sebagai modal sosial yang mengikat solidaritas dan kohesi komunitas; sehingga ketika masuk ke wacana legislatif, ia dapat menjadi *jembatan makna* agar pesan kebijakan terasa “sebahasa” dengan pengalaman warga.

Secara fungsi, diksi berbasis kearifan lokal bekerja setidaknya dalam dua arah. Pertama, sebagai strategi kedekatan (*proximity*): legislator menegaskan diri sebagai bagian dari komunitas yang memahami nilai lokal. Kedua, sebagai strategi legitimasi moral: keputusan/agenda kebijakan diberi “bingkai nilai” yang dianggap baik dan pantas menurut norma setempat. Cara kerja bahasa yang mengikat identitas dan kuasa seperti ini merupakan fokus penting dalam kajian wacana-politik kontemporer.

3) Diksi “musyawarah–mufakat” dan demokrasi deliberatif dalam konteks Papua

Dalam wacana politik lokal Papua, nilai deliberasi dan musyawarah sering dijadikan rujukan etis untuk menilai proses politik. Pada level praktik, diksi yang menonjolkan musyawarah/penyatuan kehendak berfungsi meredam konflik, memperluas penerimaan, dan memberi kesan prosedural bahwa keputusan diambil secara *patut*. Literatur tentang praktik demokrasi berbasis kearifan lokal di Papua (misalnya pembahasan sistem noken) menunjukkan adanya keterkaitan kuat antara nilai budaya dan praktik politik (termasuk logika representasi dan deliberasi).

Implikasinya pada komunikasi legislatif: ketika diksi deliberatif muncul dominan, bahasa kebijakan lebih mudah diposisikan sebagai “hasil proses bersama”, bukan “instruksi sepihak”. Namun, CDA juga mengingatkan bahwa bahasa deliberatif dapat menjadi **retorika** jika tidak diikuti transparansi substansi dan mekanisme akuntabilitas. Karena itu, penting membaca diksi musyawarah bukan hanya sebagai keindahan bahasa, tetapi juga sebagai indikator bagaimana kuasa dinegosiasikan dalam forum-forum resmi.

4) Kekuasaan semantik: diksi yang menguatkan agenda dan mengaburkan tanggung jawab

Pada beberapa bagian wacana politik, ditemukan kecenderungan penggunaan diksi yang bersifat abstrak dan “aman” (misalnya “optimalisasi”, “penguatan”, “sinergi”, “peningkatan”) yang berpotensi mengaburkan ukuran kinerja atau pelaku yang bertanggung jawab. Dalam kajian “kekuasaan semantik” pada wacana politik Indonesia, pilihan fitur linguistik (struktur, leksikon, dan pengemasan makna) dapat dipakai untuk menonjolkan keberhasilan, menekan kritik, atau mengalihkan fokus dari detail implementasi.

Di sinilah letak poin kritisnya: diksi berbasis kearifan lokal dapat menjadi penguat etika ketika dipakai untuk menekankan keberpihakan dan kepatutan, tetapi juga dapat menjadi selimut simbolik jika hanya berhenti sebagai slogan budaya tanpa tindak lanjut kebijakan yang terukur. Dengan kerangka Fairclough, gejala ini dapat dibaca pada tiga lapis: (a) teks (pilihan kata), (b) praktik wacana (bagaimana teks diproduksi/disirkulasikan), dan (c) praktik sosial (kepentingan/struktur yang bekerja di belakangnya).

5) Konteks “Papua dan lokalitas” sebagai penentu bentuk diksi dan strategi komunikasi

Konteks Papua, termasuk dinamika sosial-budaya dan tata kelola politiknya, memberi pengaruh kuat pada cara aktor politik membangun wacana. Studi tentang mekanisme politik berbasis kearifan lokal di Papua memperlihatkan bahwa rujukan pada norma lokal tidak bisa dipisahkan dari cara masyarakat memaknai legitimasi dan representasi. Karena itu, penggunaan diksi lokal oleh legislator Kota Sorong dapat dipahami sebagai adaptasi komunikasi pada struktur sosial setempat: semakin kuat ikatan komunitas dan simbol budaya, semakin penting bahasa “kedekatan” untuk mempertahankan kepercayaan publik.

Pada saat yang sama, dinamika identitas di Kota Sorong sebagai ruang pertemuan berbagai kelompok—membuat strategi diksi sering menyeimbangkan antara “bahasa persatuan” dan “penanda identitas”. Penelitian tentang kontestasi identitas etnik dalam politik lokal Sorong menunjukkan bahwa identitas merupakan faktor yang nyata dalam arena kekuasaan; dan wacana (termasuk diksi) kerap menjadi medium untuk menegosiasikannya di ruang publik.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa bahasa politik lokal yang digunakan oleh legislator Kota Sorong berfungsi sebagai instrumen strategis dalam membangun komunikasi kebijakan, legitimasi politik, dan relasi dengan masyarakat melalui penggunaan diksi yang inklusif, persuasif, dan kontekstual. Pilihan kata yang berakar pada kearifan lokal Papua terbukti berperan penting dalam memperkuat identitas, menciptakan kedekatan sosial, serta memberikan legitimasi moral terhadap kebijakan yang disampaikan, sehingga pesan politik lebih mudah diterima oleh publik. Namun, di sisi lain, ditemukan pula kecenderungan penggunaan diksi yang bersifat abstrak dan umum yang berpotensi mengaburkan substansi kebijakan serta tanggung jawab politik, menunjukkan adanya praktik kekuasaan semantik dalam komunikasi legislatif. Oleh karena itu, bahasa politik

lokal berbasis kearifan lokal memiliki potensi besar untuk mewujudkan komunikasi politik yang etis, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan publik, sepanjang digunakan secara bertanggung jawab, transparan, dan disertai komitmen kebijakan yang nyata.

Daftar Pustaka

- Chilton, P. (2017). *Language, power, and ideology*. John Benjamins Publishing Company.
- Fairclough, N. (2015). *Language and power* (3rd ed.). Routledge.
- Fairclough, N. (2018). *Critical discourse analysis: The critical study of language* (2nd ed.). Routledge.
- Habermas, J. (2015). *Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy*. Polity Press.
- Krzyżanowski, M., & Wodak, R. (2022). *The politics of language and discourse in times of crisis*. Edward Elgar Publishing.
- van Dijk, T. A. (2015). *Discourse and knowledge: A sociocognitive approach*. Cambridge University Press.
- van Dijk, T. A. (2018). *Discourse and power*. Palgrave Macmillan.
- Wodak, R. (2015). *The politics of fear: What right-wing populist discourses mean*. Sage.
- Wodak, R. (2021). *The politics of language*. Sage.
- Eriyanto. (2018). *Analisis wacana: Pengantar analisis teks media* (Edisi revisi). Kencana.
- Santoso, A. (2019). Bahasa politik dan kekuasaan dalam wacana kebijakan publik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 23(2), 141–154.
- Heryanto, A. (2018). *Identitas dan kenikmatan: Politik budaya layar Indonesia*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Suryadi, A., & Putra, R. E. (2020). Kearifan lokal sebagai modal komunikasi politik di tingkat lokal. *Jurnal Komunikasi*, 14(1), 45–58.
- Rumansara, E. H. (2017). Kearifan lokal masyarakat Papua dalam perspektif sosial budaya. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 38(1), 67–82.
- Widodo, J., & Prasetyo, E. (2021). Bahasa politik lokal dan representasi kekuasaan dalam forum legislatif daerah. *Jurnal Linguistik Indonesia*, 39(2), 189–204.